



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

KEHIMPUNAN
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025

PUSAT PENDIDIKAN KP

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat – Nya, sehingga Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi yang tertuang melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada periode Triwulan III Tahun 2025.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105,63 dari dua puluh delapan (28) indikator kinerja. Dari tiga indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada triwulan III ini, ada satu indikator kinerja yang capaiannya berstatus istimewa (atau persentase di atas 110%) dan dua indikator kinerja yang capaiannya berstatus baik (atau persentase di atas 90%).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Triwulan III Tahun 2025 ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,

Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP	9
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	10
F. Potensi dan Permasalahan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	16
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	16
D. Pengukuran Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2025	21
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama	25
C. Akuntabilitas Keuangan	62
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP	64
BAB IV PENUTUP	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	65
B. Permasalahan dan Rekomendasi	66
LAMPIRAN	
Link Bukti Dukung Capaian Pusat Pendidikan KP	
Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	

: DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP.....	5
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Pusat Pendidikan KP per September 2025	9
Tabel 1.3	Rincian Pegawai UPT Pendidikan KP per September 2025 .	10
Tabel 2.1	Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Target dan Capaian Kinerja Tahun Triwulan III Tahun 2025 Pusat Pendidikan KP	26
Tabel 3.2	Sebaran Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, atau Dunia Kerja (orang)	28
Tabel 3.3	Sebaran Lulusan Satuan Pendidikan KP Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 3.4	Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2024/2025	31
Tabel 3.5	Dokumen Kerjasama yang sudah Disepakati	34
Tabel 3.6	Sebaran Peserta Tubel Tahun 2021 – 2024	51
Tabel 3.7	Capaian IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	54
Tabel 3.8	Rekomendasi Temuan Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti	54
Tabel 3.9	IK Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	56
Tabel 3.10	Capaian IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	59
Tabel 3.11	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	59

Tabel 3.12	Capaian IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)	61
Tabel 3.13	Target dan Capaian Dokumen pada IK : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)	62
Tabel 3.14	Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP	63
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 30 September 2025	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	vii
Gambar 1.1	Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	4
Gambar 1.2	Sebaran UPT Pendidikan KP	9
Gambar 1.3	Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP	10
Gambar 3.1	Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025	21
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	22
Gambar 4.1	Hasil Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2024 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	65

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2025. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (a) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; dan (b) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

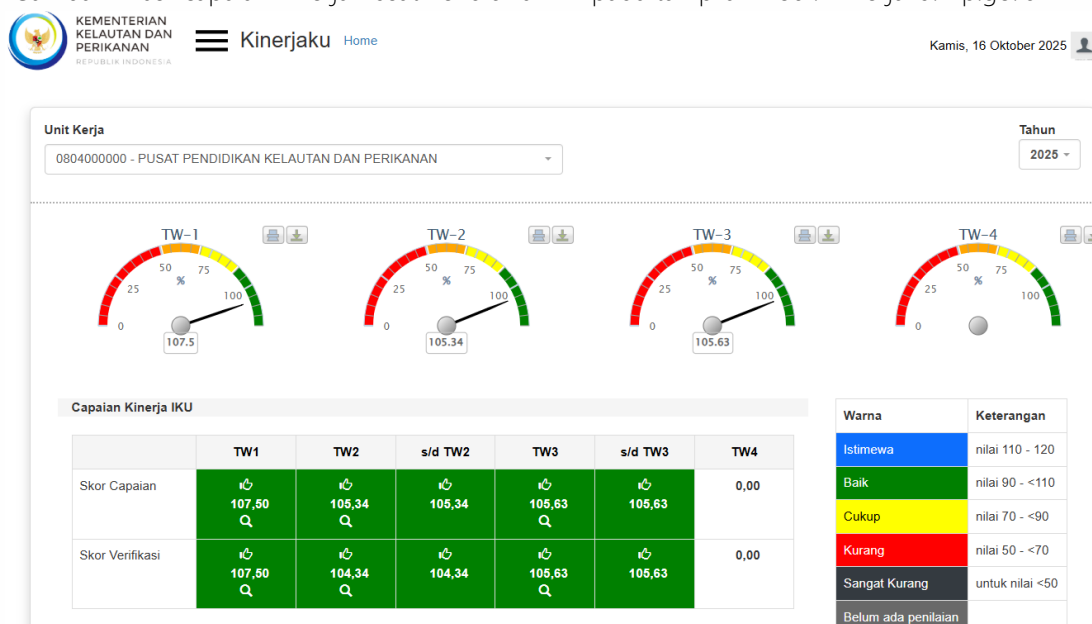
Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut, dimana Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 telah ditetapkan pada 24 Januari 2025, yang terdiri dari 6 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja. Pada 30 Juni 2025, terjadi Revisi PK pertama berdasarkan Memorandum Nomor 592/BPPSDM.3/RC.610/VI/2025. Revisi PK ini disebabkan oleh perubahan pejabat penandatangan, karena pelantikan Kepala Pusat Pendidikan KP pada 27 Maret 2025. Revisi PK tidak mengubah target dan narasi PK.

Pada 1 September 2025, terbit persetujuan anggaran Modernisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan KP berdasarkan DIPA Revisi ke-6 dengan penambahan pagu sebesar Rp.217.180.104.000. Modernisasi sarana prasarana menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing SDM kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui modernisasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium berteknologi tinggi, *teaching factory* yang representatif, dan fasilitas digitalisasi pembelajaran, diharapkan proses pendidikan dapat lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Terbit DIPA 1 September 2025 juga mengubah struktur anggaran di satuan pendidikan KP, dimana ada beberapa kegiatan yang hilang karena terkena efisiensi anggaran. Sehingga dari pagu anggaran sebesar Rp.472.453.755.000 menjadi Rp.587.426.295.000. Namun, hal ini belum tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja, sehingga pengukuran kinerja Triwulan III masih berdasarkan PK Pusat Pendidikan KP per Juni 2025.

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan di Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI), dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusdik KP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105.63%

Gambar I Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP pada tampilan web : kinerjaku.kkp.go.id



Periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target Triwulan III adalah 85%, dan capaian sebesar 80,77%, dengan persentase capaian adalah 90,52%;
2. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 80%, target Triwulan III adalah 80%, dan capaian sebesar 80%, dengan persentase capaian adalah 120,00%;
3. IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 100%, target Triwulan III adalah 66%, dan capaian sebesar 66%, dengan persentase capaian adalah 100,00%.

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada Triwulan III cukup baik, dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,63. Namun, ada satu IKU yang tidak mencapai target, yaitu IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target Triwulan III adalah 85%, dan capaian sebesar 80,77%, dengan persentase capaian adalah 95,02%. Untuk mengantisipasi ketidaktercapaian IK ini pada triwulan berikutnya, Pusat Pendidikan KP akan berkomunikasi rutin dengan Tim Auditor Itjen dalam pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

BAB I

▶ **Latar Belakang**

▶ **Tujuan**

▶ **Tugas dan Fungsi**

▶ **Potensi dan Permasalahan**

▶ **Keragaman SDM**

▶ **Sistematika Laporan Kinerja**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, menjabarkan **Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi Presiden** yang dituangkan dalam **Delapan Asta Cita**, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan 3 poin, dimana BPPSDM KP, khususnya Pusdik berkontribusi pada poin ke 3 yaitu **peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan** melalui pendidikan vokasi yang didukung secara aktif oleh 10 Politeknik KP, 1 Akademi Komunitas, dan 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia

Program dan Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja KKP Tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pusat Pendidikan KP Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan KP untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

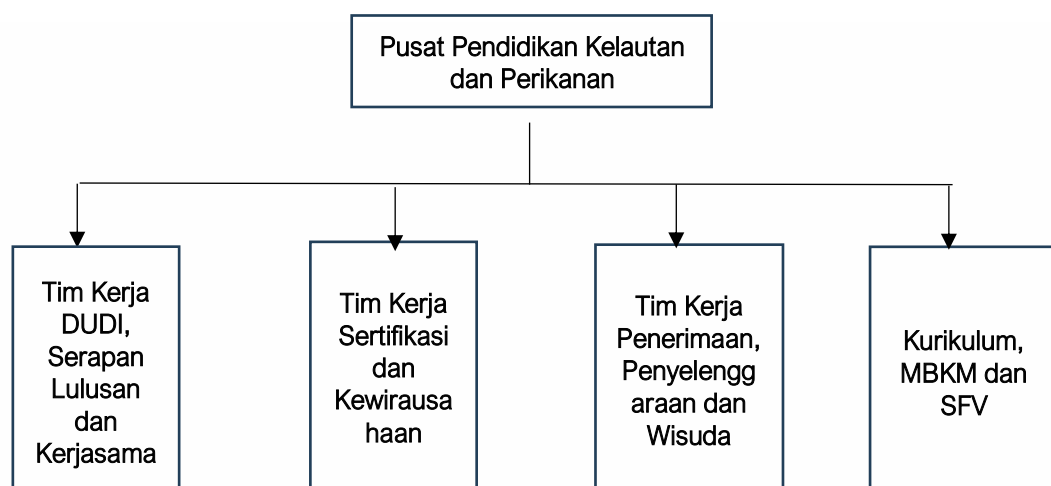
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan berada di bawah unit eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BPPSDM KP).

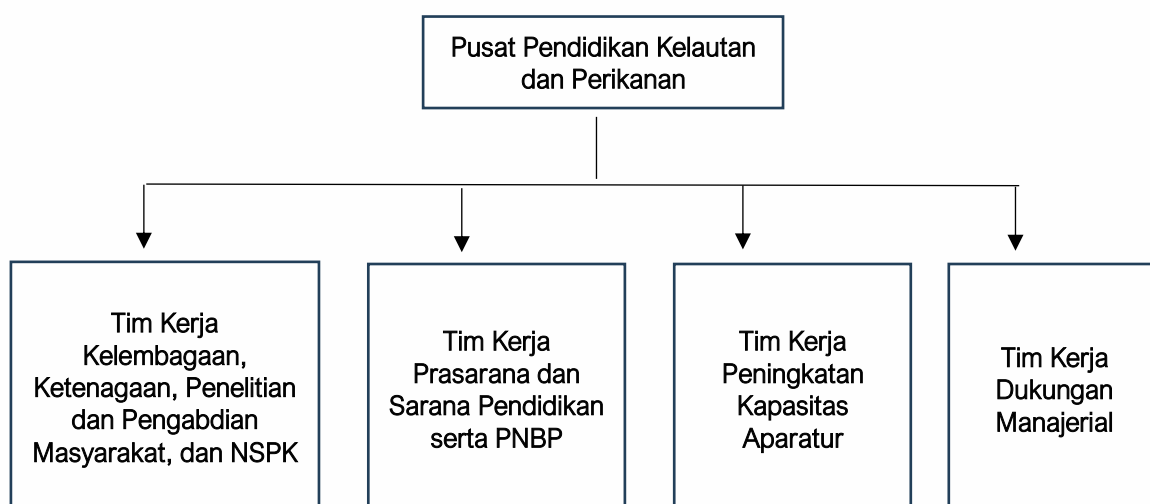
Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Pusat Pendidikan KP berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Surat Tugas Nomor: B.18/BPPSDM.3/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung kinerja organisasi Pusat Pendidikan KP, pada tanggal 14 Juli 2025 ditetapkan Surat Tugas terbaru dengan Nomor B.1588/BPPSDM.3/KP.440/VII/2025, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Gambar 1.1. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2025





Adapun uraian fungsi dari masing – masing tim kerja (timja) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP

No	Nama Tim Kerja	Uraian Fungsi
1	DUDI, Serapan Lulusan dan Kerjasama	a. Membangun dan memelihara hubungan dengan lembaga pendidikan, industri, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan program pendidikan b. Mengidentifikasi peluang kerjasama baru yang dapat mendukung pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan. c. Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis terkait pendidikan kelautan dan perikanan. d. Mengembangkan pedoman operasional untuk implementasi program kerjasama. e. Mengorganisir kegiatan pendidikan vokasi yang melibatkan kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti pelatihan, seminar, dan workshop. f. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara institusi pendidikan kelautan dan perikanan. g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerjasama untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. h. Menyusun laporan evaluasi untuk menilai efektivitas kerjasama serta memberikan rekomendasi perbaikan. i. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja

No	Nama Tim Kerja	Uraian Fungsi
2	Sertifikasi dan Kewirausahaan	a. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kompetisi kewirausahaan peserta didik, pendampingan kewirausahaan, data lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha, laporan kegiatan kewirausahaan. b. Koordinasi, persiapan dan penyusunan data lulusan, serapan lulusan dan alumni c. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi / keahlian peserta didik, laporan data kegiatan pemantauan dan evaluasi. d. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja e. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama sertifikasi dan kewirausahaan f. Menyusun data kegiatan tim Kerja g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
3	Penerimaan, Penyelenggaraan dan Wisuda	a. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, koordinasi pelantikan taruna baru, dan koordinasi pemberian bantuan biaya pendidikan b. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan vokasi KP, penyelenggaraan pendidikan karakter dan wisuda c. Penyusunan pedoman terkait penyelenggaraan pendidikan KP, pedoman pentaru, pedoman pelantikan taruna baru, wisuda dan pedoman pakaian seragam taruna d. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja e. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama penerimaan, penyelenggaraan dan wisuda f. Menyusun data kegiatan tim Kerja g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
4	Kurikulum, MBKM dan SFV	a. Koordinasi penyiapan dan penyusunan dokumen metode dan buku kurikulum serta legalisasi b. Koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan c. Laporan hasil pembelajaran, penyelenggaraan teaching factory, workshop, laboratorium, perpustakaan dan unit instalasi pendukung praktek MBKM d. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja e. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Kurikulum, MBKM f. Menyusun data kegiatan tim Kerja g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja

No	Nama Tim Kerja	Uraian Fungsi
5	Kelembagaan, Ketenagaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan NSPK	a. Legislasi NSPK Pendidikan Kelautan dan Perikanan. b. Koordinasi terkait transformasi kelembagaan pendidikan KP menuju Ocean Institute of Indonesia (Dokumen Persyaratan Usul OII) c. Koordinasi, pendampingan penyiapan dan pelaksanaan, serta pemantauan penjaminan mutu pendidikan KP (akreditasi program keahlian/program studi). Pelaksanaan Bulan Mutu Pendidikan Tinggi Pelaksanaan Bulan Mutu Pendidikan Menengah d. Merencanakan, koordinasi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP. e. Seminar Nasional, Tata Kelola Lembaga Penelitian, Inovasi dan PKM f. Merencanakan, koordinasi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi KP g. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja h. Menyusun data kegiatan tim Kerja i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
6	Prasarana dan Sarana Pendidikan serta PNB	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan standar sarana prasarana pendidikan tinggi dan menengah kelautan dan perikanan; b. melakukan inventarisasi sarana prasarana pendidikan secara berkala dan menetapkan status keadaan baik, rusak ringan, dan rusak berat; c. menganalisis kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan rencana pemenuhan kebutuhan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan; d. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi / renovasi gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan mesin, serta pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; e. melakukan pemantauan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana gedung bangunan dan sarana pendidikan; f. melakukan koordinasi penetapan sumber penerimaan fungsional PNB satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi penerimaan; g. melakukan koordinasi penetapan dan persetujuan maksimal pencairan (MP) PNB satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi pemanfaatan; h. menyusun laporan capaian kinerja bulanan, semester, dan tahunan tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNB; i. melaksanakan urusan administrasi atau pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNB lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan j. j, Menyusun Instrumen Monev Pelaksanaan MP-PNB

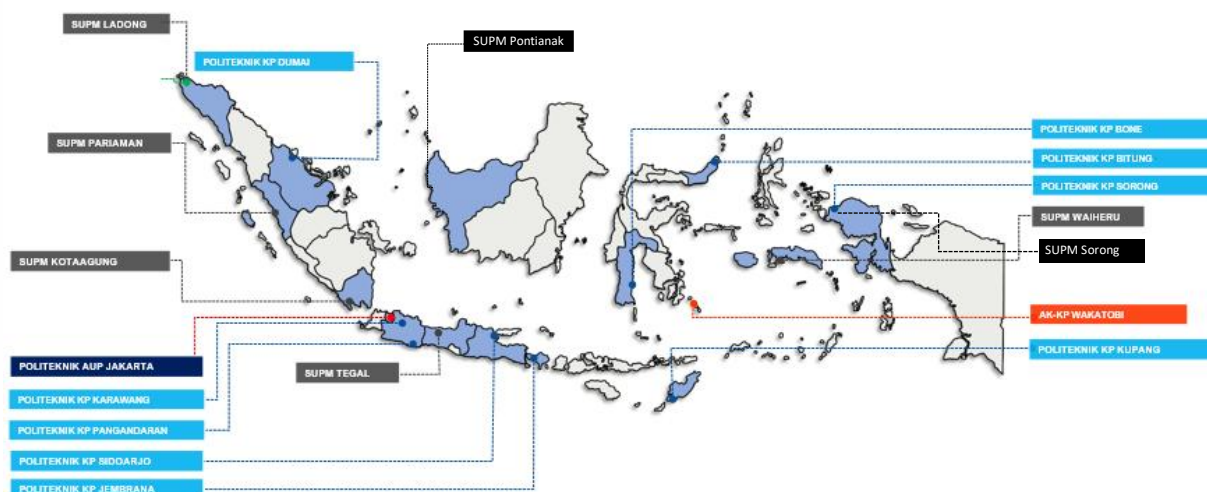
No	Nama Tim Kerja	Uraian Fungsi
		k. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Prasarana dan Sarana Pendidikan serta PNB l. Menyusun data kegiatan tim Kerja m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	a. Koordinasi, seleksi penerima beasiswa, pembayaran beasiswa, pelaksanaan Test TPA dan Toefl, layanan tugas belajar, telaah penyelenggaraan tugas belajar, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas belajar. b. Koordinasi, verifikasi usulan rekomendasi dan penyusunan rekomendasi tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rekomendasi tugas belajar c. Koordinasi, verifikasi, penyusunan rekomendasi izin belajar, layanan izin belajar, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin belajar. d. Melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembaharuan data, analisis kompetensi, evaluasi beban kerja, pemenuhan kebutuhan dosen, pemberian rekomendasi mutasi, serta persiapan penghargaan bagi guru dan dosen berprestasi. e. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja f. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Peningkatan Kapasitas Aparatur g. Menyusun data kegiatan tim Kerja dan mengkoordinasikan data pendidikan aparatur KKP h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan
8	Dukungan Manajerial	a. Koordinasi, layanan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan b. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, perencanaan program, penetapan harga satuan peserta didik, kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan c. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan d. Koordinasi, penyiapan bahan dan layanan kepegawaian dan kinerja organisasi Pusat Pendidikan KP e. Koordinasi, penyusunan dokumen kinerja, dan pengawalan target kinerja Pendidikan KP sesuai dengan aturan dan kaidah. f. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penerapan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Pusdik KP dan Satuan Pendidikan KP g. Koordinasi dan penyelesaian hasil pengawasan h. Pengelolaan dan Implementasi BMN i. Fasilitasi dan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan j. Pusdik KP

No	Nama Tim Kerja	Uraian Fungsi
		k. Koordinasi, penyiapan bahan usulan, dan pendampingan unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik l. Koordinasi dan pelaksanaan dukungan manajerial internal Pusat Pendidikan KP m. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pusat Pendidikan KP dibantu oleh 18 Satuan Pendidikan, dengan total jumlah pegawai sebanyak 64 orang di Pusat Pendidikan KP dan 1.594 orang di seluruh satuan pendidikan KP. Khusus untuk SUPM Sorong dan SUPM Pontianak, karena masih dalam proses transisi kelembagaan, maka sudah tidak melaksanakan proses belajar mengajar dan hanya melaksanakan kegiatan manajerial, Berikut sebaran UPT Pendidikan KP sebanyak 18 unit kerja sebagaimana berikut :

Gambar 1.2 Sebaran UPT Pendidikan KP



Rincian keragaan pegawai Pusat Pendidikan KP Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Rincian Pegawai Pusat Pendidikan KP per September 2025

No	Status Kepegawaian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	CPNS dan PNS	33	20	53
2	PPPK	1	1	2

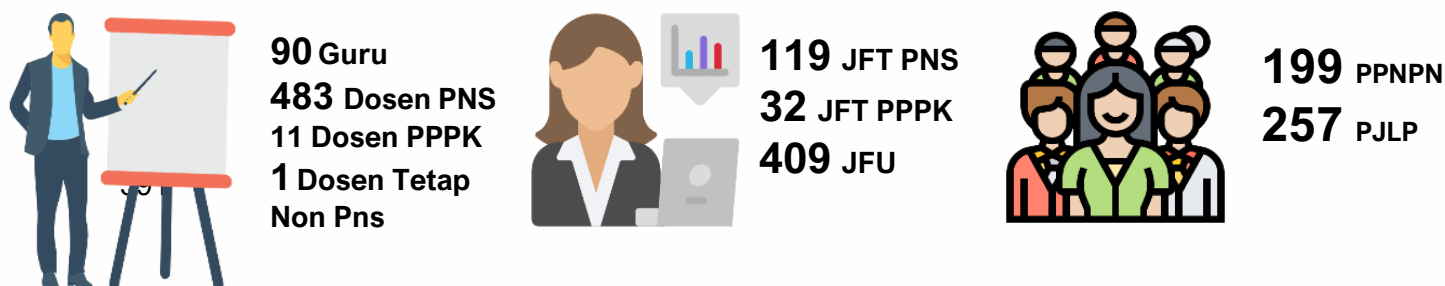
No	Status Kepegawaian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
3	PPNPN	5	3	8
4	PJLP	2	1	3
JUMLAH		41	25	66

Sementara, rincian pegawai UPT Pendidikan KP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Rincian Pegawai UPT Pendidikan KP per September 2025

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Dosen	310	185	495
2	Tenaga Kependidikan (PT)	482	201	683
3	Guru	63	27	90
4	Tenaga Kependidikan (PM)	248	85	333

Gambar 1.3 Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP



sumber : Pusat Pendidikan KP

E. Sistematika Laporan Kinerja

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Pendidikan KP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Pusat Pendidikan KP.
3. **Bab II Penetapan Perjanjian Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2025 dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Permasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**

F. Potensi dan Permasalahan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan memiliki 18 Satuan Pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 7 (Tujuh) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan pendidik berjumlah 585 orang terdiri atas 90 guru, 483 dosen PNS, 11 dosen PPPK, dan 1 dosen tetap Non PNS, dalam

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori. Satuan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah pembinaan Pusdik KP merupakan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta pascasarjana terapan dengan **program studi unggulan** meliputi Agribisnis KP, Budidaya Air Payau, Kapal Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Ikan, Perikanan Air Payau, Budidaya Laut, Kelautan, dan Ekowisata Bahari serta Konservasi. Satuan Pendidikan Menengah terdiri dari 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dengan **program keahlian unggulan** Nautika Penangkapan Ikan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Laut, dan Pengolahan Perikanan. Lulusan pendidikan pada Satuan Pendidikan KP telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian. Selain itu terdapat juga unit kerja SUPM Pontianak dan SUPM Sorong yang hanya melaksanakan fungsi manajerial untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Namun, dibalik potensi Pusat Pendidikan KP, **ada permasalahan dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi terintegrasi pemanfaatan hasil SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas pembangunan sektor KP;
2. Belum optimalnya *link and match* instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri kerja (DUDIKA) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*) dan serapan lulusan;
3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM yang masih kurang;
4. Sarpras pendidikan KP belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri kerja (DUDIKA).

BAB II

- ▶ **Rencana Strategis**
- ▶ **Rencana Kinerja Tahun 2025**
- ▶ **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**
- ▶ **Pengukuran Kinerja**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima Tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Pusat Pendidikan selaku Unit Kerja dibawah KKP dan BPPSDM KP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”**

Dalam pencapaian visi tersebut, Pusat Pendidikan KP mendukung BPPSDM melaksanakan **2 dari 8 Misi/Asta Cita** yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra- sentra produksi kelautan dan perikanan**” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas .

Tujuan Pusat Pendidikan KP yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dan BPPSDM KP dalam rangka mencapai Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Menjadikan Satuan Pendidikan KP sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) oleh Satuan Pendidikan di Indonesia.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan KP.

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
2. SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan
3. SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan
4. SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar
5. SK5 Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih

6. SK6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Rencana Kerja (RK) memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK Pusat Pendidikan KP dan cascading ke Satuan Pendidikan KP Tahun 2025. Berikut adalah Renja Pusat Pendidikan KP berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025:

Tabel 2.1 Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target 2025	Alokasi Anggaran
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	7.615 orang	Rp.136.049.072.000
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	50 Unit	Rp.3.958.000.000
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3 Unit	Rp. 1.050.000.000
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	6 Unit	Rp.26.164.973.000
5	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16 Layanan	Rp.21.575.600.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP	272 orang	Rp.8.500.000.000
7	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	19 Layanan	Rp.275.156.110.000
TOTAL			Rp.472.453.755.000

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Pusat Pendidikan KP yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Pusdik sudah mengalami revisi satu kali karena adanya pergantian pejabat penandatanganan, dimana Kepala Pusat Pendidikan KP sudah ditetapkan secara definitif pada 27 Maret 2025. Kemudian, Kepala Pusat Pendidikan KP mengirimkan memorandum kepada Sekretaris

BPPSDM KP Nomor 592/BPPSDM.3/RC.610/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Usulan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Memorandum ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan PK Revisi ke I pada 30 Juni 2025 antara Kepala BPPSDM KP dan Kepala Pusat Pendidikan KP. Revisi PK ini tidak merubah narasi dan target PK.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				PK AWAL	PK REVISI JUNI
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	2.134	2.134
		2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507	2.507
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	7.615	7.615
		4	Nilai PNBPsatker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	17,48	17,48
		5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	32	32
		6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	70	70
		7	Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100	100
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	80	80
		10	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	51	51
		11	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	14	14
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	12	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	500	500
		13	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	6	6
		14	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	16	16
		15	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	16	16
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan	5	5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				PK AWAL	PK REVISI JUNI
	dan Perikanan yang Terstandar		Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)		
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	3	3
5	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190	190
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82	82
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	85	85
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	4	4
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85	85
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82	82
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87	87
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80	80
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	80	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	1	1
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	100	100

Pada 1 September 2025, terbit persetujuan anggaran Modernisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan KP berdasarkan DIPA Revisi ke-6 dengan penambahan pagu sebesar Rp.217.180.104.000. Modernisasi sarana prasarana menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing SDM kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui modernisasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium berteknologi tinggi, *teaching factory* yang representatif, dan fasilitas digitalisasi pembelajaran, diharapkan proses pendidikan dapat lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Terbit DIPA 1 September 2025 juga mengubah struktur anggaran di satuan pendidikan KP, dimana ada beberapa kegiatan yang hilang karena terkena efisiensi anggaran. Sehingga dari pagu anggaran sebesar

Rp.472.453.755.000 menjadi Rp.587.426.295.000. Namun, hal ini belum tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja, sehingga pengukuran kinerja Triwulan III masih berdasarkan PK Pusat Pendidikan KP per Juni 2025.

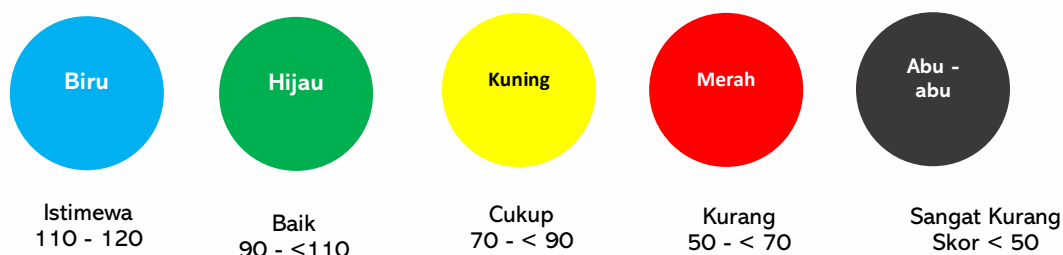
D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) kinerja dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator.

Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:



2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pendidikan KP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

BAB III

▶ **Prestasi Indikator Kerja
Triwulan III 2025**

▶ **Evaluasi dan Analisis Kinerja
Akuntabilitas Keuangan**

▶ **Efisiensi Anggaran**

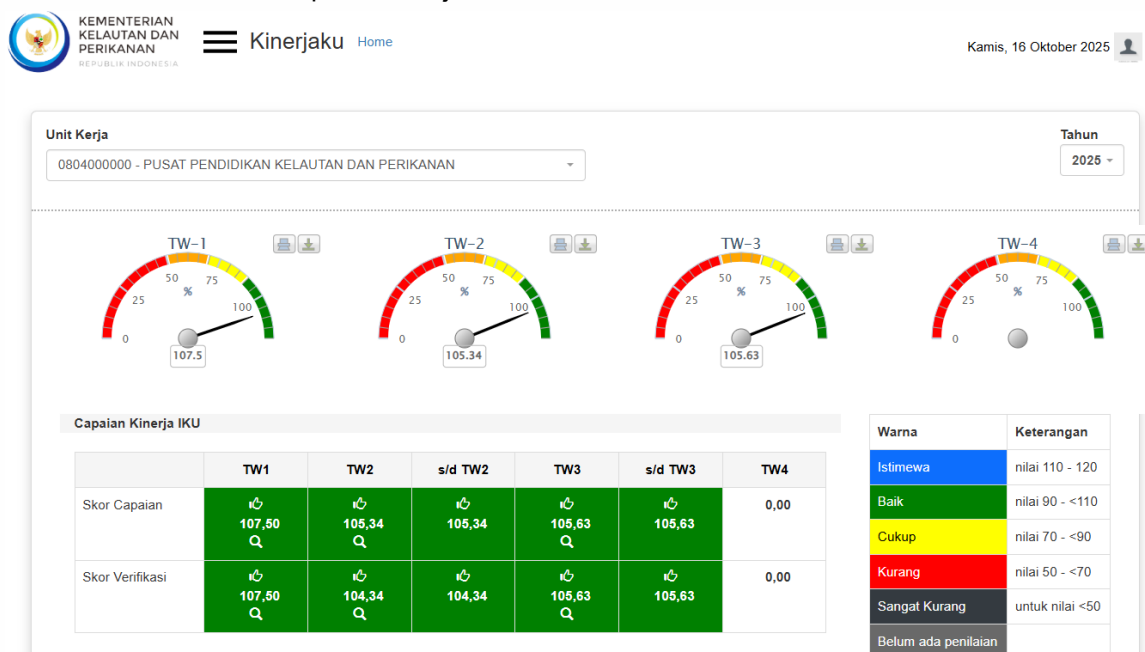
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusat Pendidikan KP di Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105,63%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 3.1. Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025



sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Sesuai dengan Rincian Target IKU, maka target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 3 IK. Detail capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar tangkapan layar dari aplikasi kinerjaku sebagai berikut :

Gambar 3.2. Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 pada web kinerjaku.kkp.go.id



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



e-Kinerja [Home](#)

Jumat, 17 Oktober 2025



NKO September - 2025

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : **105.63**

[Download](#)

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
IKSK.1	Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, atau Dunia Kerja Tambah Data Dukung +	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.134,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang) Tambah Data Dukung +	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.507,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang) Tambah Data Dukung +	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	7.615,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.4	Nilai PNPB Satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar) Tambah Data Dukung +	Rp. Miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	17,48	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan) Tambah Data Dukung +	Kesepakatan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	32,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%) Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.7	Persentase Lulusan Satuan Pendidikan yang Bersertifikasi Kompetensi (%) Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%) Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41



NKO September - 2025

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : 105.63

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol ✕
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
IKSK.9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%) Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
SK.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan											
IKSK.02.1	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket) Tambah Data Dukung +	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	51,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.02.2	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok) Tambah Data Dukung +	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	14,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
SK.03	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan											
IKSK.03.1	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang) Tambah Data Dukung +	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	500,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.03.2	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK) Tambah Data Dukung +	NSPK	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.03.3	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga) Tambah Data Dukung +	Lembaga	Maximize	Nilai Posisi Akhir	16,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
IKSK.03.4	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga) Tambah Data Dukung +	Lembaga	Maximize	Nilai Posisi Akhir	16,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
SK.04	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar											
IKSK.04.1	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket) Tambah Data Dukung +	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41

NKO September - 2025

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : 105.63

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.04	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar											
IKSK.04.2	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
SK.05	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih											
IKSK.05.1	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	190,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
IKSK.05.2	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
IKSK.05.3	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						105,63			105,63		
IKSK.06.1	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	Unit Kerja	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
IKSK.06.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	80,77	95,02	85,00	80,77	95,02	15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung Data Dukung1											
IKSK.06.3	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											
IKSK.06.4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung											



NKO September - 2025

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Skor Kinerja : 105.63

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol ✕
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						105,63			105,63		
IKSK.06.5	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung + Data Dukung1 ✕											
IKSK.06.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung +											
IKSK.06.7	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP	Proposal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung +											
IKSK.06.8	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	100,00	15-Oct-2025 15:41
	Tambah Data Dukung + Data Dukung1 ✕											
Tutup												

sumber : kinerjaku.kkp.go.id

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP.

Penjabaran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pusat Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	0	0	-
		2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	0	0	-
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	0	0	-
		4	Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	0	0	-
		5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	0	0	-
		6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	0	0	-
		7	Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	0	0	-
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	0	0	-
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	0	0	-
		10	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	0	0	-
		11	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	0	0	-
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	12	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	0	0	-
		13	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		14	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	0	0	-
		15	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	0	0	-
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	0	-
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	0	-
5	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	0	0	-
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	0	0	-
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	0	0	-
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	0	0	-
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85	80,77	95,02
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	0	0	-
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	0	0	-
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80	100,00	120,00
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	0	0	-
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	66	66	100,00

sumber : Pusat Pendidikan KP

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Indikator ini mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual.

IKU ini diukur semesteran, dimana triwulan III tidak ada target. Serapan lulusan sampai dengan Triwulan III ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Sebaran Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, atau Dunia Kerja (orang)

No	Satuan Pendidikan	Serapan Lulusan			
		Dunia Usaha	Dunia Industri	Dunia Kerja	Jumlah
1	SUPM Ladong	3	21		24
2	SUPM Pariaman		25		25
3	SUPM Kotaagung		19	14	33
4	SUPM Tegal		44		44
5	SUPM Waiheru		26		26
Jumlah		3	135	14	152

sumber : Pusat Pendidikan KP

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencapaian IKU ini antara lain :

1. Verifikasi serapan lulusan di satuan pendidikan KP oleh Pusat Pendidikan KP. Hal ini dilakukan agar terdapat data serapan lulusan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk publik.

2. Pendataan lulusan satuan pendidikan yang sudah bekerja dan berwirausaha oleh satuan pendidikan KP, baik melalui grup alumni, media sosial, maupun kontak personal ke lulusan.
3. Pendataan kerja sama dengan dunia usaha / dunia industri guna memudahkan pendataan untuk penyerapan alumni

Indikator Kinerja Utama 2

Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)

Output dari proses pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan potensi diri mereka sudah berkembang dengan maksimal, sehingga siap untuk menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan pendidikan dengan jenjang tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh peserta didik satuan pendidikan KP selama menempuh pendidikan 1, 3, atau 4 tahun di satuan pendidikan KP.

Pengukuran IKU ini dilakukan semesteran, dimana Triwulan III tidak ada target. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan III adalah satuan pendidikan menengah sudah meluluskan sebanyak 516 orang dengan Proses Pelepasan Lulusan yang dilaksanakan secara *hybrid* di SUPM Tegal pada 4 Juni 2025, dengan rincian lulusan adalah sebagai berikut :

1. SUPM Ladong sebanyak 73 orang
2. SUPM Pariaman sebanyak 121 orang
3. SUPM Kotaagung sebanyak 73 orang
4. SUPM Tegal sebanyak 144 orang
5. SUPM Waiheru sebanyak 105 orang

Sementara dari satuan pendidikan tinggi, sudah meluluskan sebanyak 1973 orang, dan sudah dilaksanakan Wisuda Pendidikan Tinggi secara *hybrid* di Politeknik AUP pada 16 Juli 2025, dengan rincian lulusan sebagai berikut :

1. Politeknik AUP sebanyak 506 orang
2. Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 196 orang;
3. Politeknik KP Bitung sebanyak 146 orang
4. Politeknik KP Sorong sebanyak 141 orang

5. Politeknik KP Karawang sebanyak 93 orang
6. Politeknik KP Kupang sebanyak 207 orang
7. Politeknik KP Bone sebanyak 295 orang
8. Politeknik KP Dumai sebanyak 95 orang
9. Politeknik KP Pangandaran sebanyak 88 orang
10. Politeknik KP Jembrana sebanyak 165 orang;
11. AK KP Wakatobi sebanyak 41 orang.

Tabel berikut menjabarkan jumlah lulusan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.3. Sebaran Lulusan Satuan Pendidikan KP Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin

No	Satuan Pendidikan KP	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Politeknik AUP	293	213	506
2	Politeknik KP Sidoarjo	103	93	196
3	Politeknik KP Bitung	91	55	146
4	Politeknik KP Sorong	88	53	141
5	Politeknik KP Karawang	49	44	93
6	Politeknik KP Bone	160	135	295
7	Politeknik KP Kupang	127	80	207
8	Politeknik KP Dumai	61	34	95
9	Politeknik KP Pangandaran	48	40	88
10	Politeknik KP Jembrana	98	67	165
11	AK Wakatobi	22	19	41
12	SUPM Ladong	48	25	73
13	SUPM Pariaman	85	36	121
14	SUPM Kotaagung	48	25	73
15	SUPM Tegal	105	39	144
16	SUPM Waiheru	61	44	105
Total		1.487	1.002	2.489

sumber : Pusat Pendidikan KP

Indikator Kinerja Utama 3

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarwan Danim (2010: 1) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses

pendidikan formal”. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Tugas inilah yang diemban oleh Pusat Pendidikan dan Satuan Pendidikan KP, mengembangkan peserta didik sesuai potensi mereka yang tepat di dunia kelautan dan perikanan. KKP memiliki 5 SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah/ setara dengan SMK) yang masih aktif, 1 Akademi Komunitas, dan 10 Politeknik Kelautan dan Perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, satuan pendidikan KP memiliki program studi/ program keahlian yang sesuai dengan permintaan di dunia usaha/ dunia industri, dengan garis besar program studi/ keahliannya antara lain penangkapan ikan, budidaya perikanan/ kelautan, permesinan kapal, dan pengolahan hasil produk kelautan/ perikanan.

Periode pengukuran IKU ini adalah semester, dan Triwulan III tidak ada target. Sampai dengan Triwulan III, jumlah peserta didik di satuan pendidikan KP adalah 6.400 orang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2024/2025

No	Satuan Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Politeknik AUP	1.699	913	2612
2	Politeknik KP Sidoarjo	392	256	648
3	Politeknik KP Bitung	263	130	393
4	Politeknik KP Sorong	219	84	303
5	Politeknik KP Karawang	177	116	293
6	Politeknik KP Bone	269	158	427
7	Politeknik KP Kupang	246	119	365
8	Politeknik KP Dumai	186	67	253
9	Politeknik KP Pangandaran	135	110	245
10	Politeknik KP Jembrana	154	120	274
11	AK Wakatobi	22	10	32
12	SUPM Ladong	63	31	94
13	SUPM Pariaman	83	16	99
14	SUPM Kotaagung	57	20	77
15	SUPM Tegal	101	32	133
16	SUPM Waiheru	90	62	152
Total		4.156	2.244	6.400

sumber : Pusat Pendidikan KP

Jika jumlah eksisting peserta didik ini dibandingkan dengan target tahunan sebesar 7.615 orang, maka persentase capaian baru mencapai 84,04%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan kuota penerimaan taruna baru oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana awalnya, berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Pendidikan KP No.B.524/BPPSDM/RSDM.410/II/2025 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebanyak 1.650 orang, dan Pengumuman Kepala Pusat Pendidikan KP No.B.526/BPPSDM/RSDM.410/II/2025 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Ajaran 2025/2026, adalah sebanyak 487 orang, sehingga total kuota penerimaan taruna baru adalah sebanyak 2.137 orang.

Guna meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan KP, maka akhirnya KKP menerbitkan pengumuman Kepala Pusat Pendidikan KP No. B.1619/BPPSDM.3/RSDM.410/VII/2025 tentang Perubahan Kuota Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026, menjadi sebanyak 1.000 orang, dan pengumuman Kepala Pusat Pendidikan KP No. B.1526/BPPSDM.3/RSDM.410/VII/2025 tentang Perubahan Kuota dan Program/Konsentrasi Keahlian Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Ajaran 2025/2026, menjadi sebanyak 300 orang, sehingga total penerimaan taruna baru adalah 1.300 orang. Rencana tindak lanjut dari penyesuaian perubahan kebijakan penerimaan taruna baru ini adalah penyesuaian anggaran makan dan merevisi target tahunan peserta didik di masing – masing satuan pendidikan KP sesuai kuota penerimaan terakhir.

Indikator Kinerja Utama 4

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari **pajak** dan penerimaan bukan pajak yang disebut **penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**.

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBPN meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Lainnya (Non SDA), dan PNBPN BLU. Sesuai PP 85 Tahun 2022 terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan dan pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu, ada juga pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan juga pendapatan biaya pendidikan.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar Rp. 17,48M. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, PNBPN yang sudah disetorkan ke negara adalah sebesar Rp.15.641.839.600 (84,90%), dengan rincian pendapatan fungsional sebesar Rp.3.053.923.076 dan non fungsional sebesar Rp.12.587.916.524.

Indikator Kinerja Utama 5

Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup. Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Pendidikan KP atau Satuan Pendidikan KP dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
5. Diseminasi dan publikasi;
6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebanyak 32 dokumen. Sampai dengan Triwulan III, kerja sama yang sudah disepakati sebanyak 26 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Dokumen Kerjasama yang sudah Disepakati

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
1	Politeknik AUP	PT SEJAHTERA FALAM INDONESIA	21/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	3 Februari 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2. Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yaitu Prkatik Akhir, Praktik Lapang dan Kegiatan Magang, terkait dengan Praktik Teknologi Akuakultur dan Agrikultur secara umum 1. Penyerapan Lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pihak Kedua
2	Politeknik AUP	PT MEGA BARUNA FISHERIES	21/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	3 Februari 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3	Politeknik KP Sidoarjo	PT. Ajinomoto Indonesia	31/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	23 Januari 25	Kajian Teknis Pembesaran Ikan Wader Pada Kolam Bundar Sistem Ras Dengan Padat Penebaran Berbeda	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kajian teknis pembesaran ikan wader pada kolam bundar sistem ras dengan

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						padat penebaran berbeda.
4	Politeknik KP Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten Paser	32/BPPSDM/KKP/P KS/IV/2025	24 April 2025	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas SDM
5	Politeknik KP Sidoarjo	PT. Istana Cipta Sembada	41/BPPSDM/KKP/P KS/VI/2025	30 Juni 2025	Pengembangan Sumber Daya Bidang Perikanan	1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta taruna pada bidang perikanan 2. Kolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan 3. Melakukan kunjungan atau praktek integrasi praktik kerja lapangan (PKL), kerja praktik akhir (KPA) dan magang industri di lokasi pihak kedua 4. Penyerapan lulusan 5. Penyediaan sumber daya dan memberikan rekomendasi

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						lulusan yang berkompeten dari Politeknik KP Sidoarjo untuk kebutuhan tenaga kerja 6. Penelitian pengembangan produk dan inovasi teknologi bidang pengolahan perikanan sesuai dengan kepentingan para pihak
6	Politeknik KP Bitung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG	7/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	4 Februari 2025	Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM KP	1. Pemberian Akses dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan KP bagi putra-putri pelaku utama perikanan dan pemangku kepentingan lainnya; 2. Fasilitasi menyelenggarakan pendidikan KP bagi pemangku kepentingan; 3. Pemberian akses pelatihan KP bagi pemangku kepentingan.
7	Politeknik KP Sorong	PT CITRA RAJA AMPAT CANNING SORONG	4/BPPSDM/KKP/PKS/I/2025	30 Januari 2025	Penyerapan Lulusan serta Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang KP	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar Internasional (MSC); 2. Penyediaan dan pendayagunaan prasarana dan tenaga masing – masing Pihak; 3. Penyerapan lulusan dan

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						alumni Politeknik KP Sorong sesuai ketentuan yang berlaku
8	Politeknik KP Sorong	PT SINAR ABADI CEMERLANG SEMARANG	3/BPPSDM/KKP/PKS/I/2025	30 Januari 2025	Peningkatan Kompetensi SDM KP serta Penyerapan Lulusan	1. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi taruna/l Politeknik KP Sorong; 2. Pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar bidang perikanan, PKL; 3. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik KP Sorong sesuai ketentuan yang berlaku
9	Politeknik KP Karawang	Kejaksaan Negeri Karawang	23/BPPSDM/KKP/P KS/III/2025	19 Maret 2025	Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	1. Bantuan Hukum 2. Pertimbangan hukum 3. Tindakan hukum lain
10	Politeknik KP Kupang	CSR PT. Pertamina	43/BPPSDM/KKP/P KS/VII/2025	30 Juli 2025	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Desa Bokonusan Dalam Rangka <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) PT. Pertamina Patra Niaga IT Tenau Nusa Tenggara Timur	Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Desa Bokonusan dalam rangka <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tenau
11	Politeknik KP Kupang	SACS	44/BPPSDM/KKP/P KS/VII/2025	31 Juli 2025	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Serta Penyerapan Lulusan	1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2. penyerapan lulusan dan alumni Politeknik KP Kupang

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						3. penyediaan informasi dan sosialisasi terkait penerimaan Taruna Baru (PENTARU)
12	Politeknik KP Bone	Universitas Brawijaya	34/BPPSDM/KKP/P KS/V/2025	16 Mei 2025	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Keterampilan Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia melalui perkuliahan, praktik, penelitian, seminar-seminar, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Pelaksanaan pelatihan dan magang bagi mahasiswa/taruna, dosen dan tenaga pendidikan 3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama 4. Pemanfaatan fasilitas bersama, gedung auditorium, <i>teaching factory</i> (TEFA), Laboratorium komputer, laboratorium Bahasa Inggris dan laboratorium kebijakan publik serta fasilitas lainnya
13	Politeknik KP Bone	Politeknik Negeri Malang	38/BPPSDM/KKP/P KS/VI/2025	16 Juni 2025	Penyelenggaraan Tri Dharma dan Implementasi Program Merdeka Belajar	1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
					– Kampus Merdeka (MBKM)	bidang kelautan dan perikanan 2. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
14	Politeknik KP Dumai	CV. Jaya Fish Gemilang	8/BPPSDM/KKP/PK S/II/2025	5 Februari 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan	a. Pemanfaatan tenaga ahli untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan b. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dan kerja praktik akhir c. Program penyerapan lulusan
15	Politeknik KP Dumai	PT. Langkat Laut Timur	37/BPPSDM/KKP/P KS/VI/2025	25 Juni 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan	a. Pemanfaatan tenaga ahli untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan b. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dan kerja praktik akhir c. Program penyerapan lulusan
16	Politeknik KP Pangandaran	CV. Labaik Koi Hatchery Sukabumi	12/BPPSDM/KKP/P KS/II/2025	31 Januari 2025	Penyelenggaraan praktik kerja lapangan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma perguruan tinggi	a. penyelenggaraan pendidikan b. Penelitian c. Pengabdian kepada masyarakat
17	Politeknik KP Pangandaran	Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika-BRIN	48/BPPSDM/KKP/P KS/VIII/2025	15 Agustus 2025	Riset dan Inovasi Terkait <i>Floating Offshore Wind Turbine</i>	1. Riset dan inovasi terkait Terkait <i>Floating</i>

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						<i>Offshore Wind Turbine</i> 2. Diseminasi hasil penelitian 3. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana 4. Pertukaran personil dan/atau tenaga ahli 5. Pendampingan riset 6. Pertukaran data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka pendukung kegiatan pelaksanaan.
18	Politeknik KP Jembrana	PT SPIRALIFE BIOTEKNOLOGI INDONESIA	13/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	10 Februari 2025	Kegiatan Penelitian	Penelitian dan Publikasi Bersama
19	Politeknik KP Jembrana	PT. Haida Agriculture Indonesia	39/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2025	16 Juni 2025	Penyerapan Lulusan	Perekrutan kerja lulusan PKP Jembrana
20	Politeknik KP Jembrana	THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SRI LANKA	14/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	4 Februari 2025	<i>Joint Collaboration To Support The 12th International Conference On Fisheries And Aquaculture 2025 (Icfa 2025)</i>	1. <i>Support the of the 12th International Conference on Fisheries and Aquaculture 2025 (ICFA 2025) to be held from 30th – 31st October 2025 Bangkok, Thailand (hereinafter referred to as the Conference).</i> 2. <i>Facilitate an effective platform to share the knowledge, whilst empowering participants through providing a solid platform for them to present their research</i>

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						<i>findings to a global audience</i>
21	Politeknik KP Jembrana	UD Ulam Sari	24/BPPSDM/KKP/P KS/III/2025	21 Maret 2025	Pemanfaatan Lahan Tambak Busmetik untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Bidang Pembesaran Udang Vaname Sistem Intensif TEFA Budi Daya Ikan	1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan melalui kerja sama pemanfaatan lahan tambak 2. Pengembangan kompetensi sumber daya Taruna melalui pembelajaran berbasis kegiatan industri budi daya udang 3. Penguatan riset terapan dan inovasi teknik budi daya perikanan 4. Pertukaran informasi
22	SUPM Pariaman	Diskan Pangan Kota Padang	57/BPPSDM/KKP/P KS/IX/2025	11 September 2025	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Program Pusat Pelayanan Ikan Terpadu	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Transformasi teknologi perikanan khususnya untuk pengembangan perikanan budidaya
23	SUPM Pariaman	LPK SEII	55/BPPSDM/KKP/P KS/IX/2025	1 September 2025	Kerja Sama Pendidikan, Keterampilan, dan Penempatan Lulusan Bekerja Keluar Negeri	1. Pelatihan dan persiapan tenaga kerja ke jepang 2. Penerimaan, penyerapan lulusan SUPM Pariaman dan Program Keahlian

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
						APAPL, APHP, TKPI dan NKPI 3. Penyaluran Informasi lowongan pekerjaan lingkup Kelautan dan Perikanan ke Jepang
24	SUPM Tegal	LPM Bina Tunas Bahari Juwana	62/BPPSDM/KKP/P KS/X/2025	8 Oktober 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan
25	SUPM Tegal	PT. Kelola Laut Nusantara	63/BPPSDM/KKP/P KS/X/2025	8 Oktober 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Penyerapan Lulusan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penyerapan lulusan
26	SUPM Waiheru	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	30/BPPSDM/KKP/P KS/IV/2025	15 April 2025	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan kegiatan praktik lapang dan program MBKM 2. Penyerapan Lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

sumber : Pusat Pendidikan KP

Indikator Kinerja Utama 6

Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)

Indikator Kinerja ini menunjukkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah kerjasama yang masih berlaku dan ditargetkan untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025. Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target pada tahun 2025 adalah 70%, dan sampai dengan Triwulan III sudah tercapai 75,95% (atau 60 dokumen dari target tahunan 79 dokumen)

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase Lulusan Satuan Pendidikan yang Bersertifikasi Kompetensi (%)

IK ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah disertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang kelautan dan perikanan, dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang diusulkan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target sebesar 100%. IK ini diturunkan ke seluruh satuan pendidikan KP. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah pelaksanaan wisuda untuk 516 lulusan dari satuan pendidikan menengah KP yang dilaksanakan pada 4 Juni 2025, dan 1.973 lulusan satuan pendidikan tinggi KP yang dilaksanakan pada 16 Juli 2025, dan seluruh lulusan satuan pendidikan KP sudah memiliki sertifikasi kompetensi.

Indikator Kinerja Utama 8

Persentase Anak Pelaku Utama yang Diterima sebagai Peserta Didik Baru (%)

Sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan KP memiliki kebijakan dalam proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan KP. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur penerimaan, yakni jalur umum dan jalur khusus. Jalur umum adalah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan lingkup KKP yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat umum. Jalur khusus adalah sistem penerimaan peserta didik dari anak pelaku utama, yang dimaksud pelaku utama adalah masyarakat yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, dan pemasar perikanan.

IK ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target adalah 100%. Satuan pendidikan KP melakukan seleksi penerimaan taruna baru secara terpusat melalui pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi, dan pentaru.kkp.go.id/supm/ untuk pendidikan menengah KP. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, proses penerimaan taruna baru, baik di satuan pendidikan tinggi maupun menengah sudah selesai, dan sudah diterbitkan Keputusan Kepala Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 274 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Induk Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak 992 orang, dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 275 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Induk Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Ajaran 2025/2026 sebanyak 299 orang, sehingga total taruna baru TA 2025/2026 adalah sebanyak 1.291 orang.

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase Peserta Didik yang Mendukung Program Prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)

IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik yang terlibat dalam Program Prioritas KKP melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.

Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan melalui Politeknik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan MBKM di lokasi Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Penangkapan Ikan Secara Terukur dan Peningkatan Produksi Perikanan melalui Budidaya Ikan melalui MBKM ini. Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 80%. IK ini hanya diukur di Pusat Pendidikan KP. Sampai dengan Triwulan III, berdasarkan data sementara, ada 453 taruna yang mendukung Program Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) dan 30 taruna yang mendukung Program Kampung Perikanan Budidaya (KPB).

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 10

Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak di bidang pendidikan, maka satuan pendidikan tinggi KP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Indikator ini menunjukkan jumlah paket kajian pendidikan tinggi dalam bentuk penelitian yang dilaksanakan secara terpusat dan oleh satuan pendidikan KP.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 51 paket. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan KP adalah mencari mitra kerjasama dari pihak luar, khususnya dalam hal pembiayaan, dikarenakan untuk biaya APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja Utama 11

Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan memberikan contoh langsung dan diuji cobakan oleh kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan.

Acuannya yaitu Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan dan mengajarkan teknologi, metode, atau praktik yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 14 Kelompok. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan KP adalah mencari mitra kerjasama dari pihak luar, khususnya dalam hal pembiayaan, dikarenakan untuk biaya APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 12

Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)

IKU ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses pembelajaran. Yang menjadi bagian dari target IKU ini adalah tenaga pendidik (dosen/guru) dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran, teknisi tambak, teknisi hatchery, dll yang mendukung proses pembelajaran.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 500 orang. Sampai dengan Triwulan III, Periode Sertifikasi Pendidik bagi Dosen (Serdos) belum dibuka oleh Kemdiktisaintek. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Juknis Serdos, menggunakan Kepdirjendikti, Kemendiktisaintek No.53/B/KPT/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosenan. Sementara untuk sertifikasi guru, ada 1 guru dari SUPM Ladong dan 1 guru dari SUPM Tegal yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (Dalam Jabatan) yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Ruang GTK.

Pencapaian IKU ini terkendala anggaran, dikarenakan APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daian Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja Utama 13

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan KP dan penyelenggaranya untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikan KP. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 6 dokumen, dan sampai dengan Triwulan III, NSPK yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP adalah:

1. Peraturan Kepala BPPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KKP
2. Peraturan Kepala BPPSDM No.2 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi KKP
3. Peraturan KEPALA BPPSDM No. 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisuda pada Satuan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan KKP
4. Peraturan Kepala BPPSDM No. 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelepasan Lulusan Pada Satuan Pendidikan Menengah di Lingkungan KKP
5. Keputusan Kepala BPPSDM KP No. 215 Tahun 2025 tentang Pedoman Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Utama 14

Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan satuan pendidikan. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Akreditasi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.

Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandar, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik. Tahapan proses Akreditasi meliputi:

- a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
- b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 16 Lembaga. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, sertifikat akreditasi kelembagaan yang sudah keluar berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)

1. Prodi TBP, Politeknik KP Bone, dengan akreditasi "Baik Sekali", 11 Maret 2025
2. Prodi BDI, Politeknik KP Jemberana, dengan akreditasi "Unggul", 24 Juni 2025
3. Prodi BDI, Politeknik KP Pangandaran, dengan akreditasi "Unggul", 5 Agustus 2025

4. Prodi TAK, Politeknik AUP, dengan akreditasi "Unggul", 1 Juni 2025
 5. Prodi MP, Politeknik KP Bitung, dengan akreditasi "Unggul", 13 Agustus 2025
 6. Prodi TPI, Politeknik KP Karawang, dengan akreditasi "Unggul", 2 September 2025
 7. Prodi Konservasi, AKKP Wakatobi, dengan akreditasi "Baik", 25 Maret 2025;
- Dan penilaian berdasarkan Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
8. SUPM Waiheru dengan Akreditasi "A", 18 Februari 2025

Indikator Kinerja Utama 15

Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)

Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan merupakan satuan pendidikan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah. Pengelolaan lembaga pendidikan ditujukan agar adanya keseragaman penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Dalam rangka tersebut maka Pusat Pendidikan KP melaksanakan kegiatan secara terpusat untuk 16 satuan pendidikan. Kegiatan tersebut yaitu penerimaan peserta didik baru, pengadaan kartu taruna, pembinaan peserta didik, wisuda pendidikan menengah, wisuda pendidikan tinggi, biaya anak pelaku utama, VOGA Festival, penyelenggaraan sertifikasi, MBKM terpusat, pengendalian sarana prasarana satuan pendidikan, transformasi kelembagaan, pengelolaan ketenagaan, dan pelayanan publik.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 16 lembaga. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan yang sedang dilakukan adalah pengendalian sarana prasarana satuan pendidikan, transformasi kelembagaan, pengelolaan ketenagaan, dan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar

Indikator Kinerja Utama 16

Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP, perlu juga ada peningkatan pada komponen prasarannya, salah satunya adalah peralatan dan mesin pendidikan serta teknologi informasi dan komunikasi bidang KP. IKU

ini merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan peralatan/mesin/meubelair/sarana/teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP. Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNB, BLU, SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing dihitung 1 paket.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 5 paket, yang diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 2 paket, Politeknik KP Karawang sebanyak 1 paket, Politeknik KP Dumai sebanyak 1 paket, dan SUPM Pariaman sebanyak 1 paket. Untuk anggaran di Politeknik KP Sidoarjo dan Politeknik KP Dumai, terkena efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

Adapun di Politeknik KP Karawang, berupa *Meubelair Simulator* dan *Fishing and Navigation Simulator* masih menunggu selesainya pembangunan gedung simulator. Namun, sudah dilaksanakan pengadaan Meubelair Simulator dengan nilai sebesar Rp.199.600.000 dengan BAST Nomor: 01/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAST/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025. Adapun di SUPM Pariaman, sudah selesai dilaksanakan, berupa Pengadaan Pemasangan Instalasi CCTV sejumlah Rp.49.996.620 dengan Nomor BAST B.107/BAST/SUPM-PRM/PL.410/II/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Untuk mendukung pembentukan *Ocean Institute of Indonesia* (OII), pada 1 September 2025, Pusat Pendidikan KP mendapatkan anggaran tambahan sebanyak Rp. Rp.119.835.274.000 untuk transformasi dan modernisasi sarana prasarana di satuan pendidikan tinggi KP. Melalui revitalisasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium berteknologi tinggi, *teaching factory* yang representatif, dan fasilitas digitalisasi pembelajaran, diharapkan proses pendidikan dapat lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Penambahan pagu ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Pusat Pendidikan KP, sehingga langkah selanjutnya adalah mengajukan perubahan target pada IK ini di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP.

Indikator Kinerja Utama 17

Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek, dan sebagainya”. Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi Pendidikan mengatakan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 3 paket yang diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 1 paket, Politeknik KP Karawang sebanyak 1 paket, dan SUPM Pariaman sebanyak 1 paket. Untuk anggaran pengadaan di Politeknik KP Sidoarjo dan SUPM Pariaman terkena efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025, dan untuk Politeknik KP Karawang adalah Pembangunan Gedung Simulator menggunakan biaya SBSN. Tahapan yang sudah dilakukan Politeknik KP Karawang sampai dengan Triwulan III adalah Sampai dengan progres pekerjaan fisik minggu ke-23, realisasi fisik sudah mencapai 53,439%. Realisasi anggaran sebesar Rp.2.708.242.657 (pembayaran termin I konsultan pengawas dan penyedia konstruksi).

Untuk mendukung pembentukan *Ocean Institute of Indonesia* (OII), pada 1 September 2025, Pusat Pendidikan KP mendapatkan anggaran tambahan sebanyak Rp. Rp.97,344,830,000 untuk transformasi dan modernisasi sarana prasarana di satuan pendidikan tinggi KP. Melalui revitalisasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium berteknologi tinggi, *teaching factory* yang representatif, dan fasilitas digitalisasi pembelajaran, diharapkan proses pendidikan dapat lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Penambahan pagu ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Pusat Pendidikan KP, sehingga langkah selanjutnya adalah mengajukan perubahan target pada IK ini di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP.

Sasaran Kegiatan 5

Aparatur yang Dididik dan Dilatih

Indikator Kinerja Utama 18

Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian tugas belajar dapat meningkatkan

kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Periode pengukuran untuk IKU ini adalah semesteran, dan Triwulan III tidak ada target. Sampai dengan triwulan III, sebaran petubel di masing – masing eselon I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Sebaran Peserta Tubel Tahun 2021 – 2024

NO	ESELON I	TAHUN DAN JENJANG										TOTAL
		2021		2022		2023		2024				
		S2	S3	S2	S3	S2	S3	DIV	DIVs	S2	S3	
1	SETJEN					1				2		3
2	DJPRL					9						9
3	DJPK						1			5		6
4	DJPT					5		1		5		11
5	DJPB					8	1			3		12
6	DJPDSPKP					2				4		6
7	DJPSPDKP					11	1	3	7	4		26
8	ITJEN					1				2		3
9	BPPSDM		8		13	13	24			9	12	79
10	BPPMHKP									1		1
			8		13	50	27	4	7	35	12	156

Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah:

1. Pembayaran biaya hidup dan biaya penelitian untuk PNS tugas belajar angkatan tahun 2020 – 2023;
2. Monitoring petubel, baik ke pihak perguruan tinggi maupun ke petubelnya langsung;

Kegiatan Aparatur KKP yang diberikan beasiswa ini merupakan salah satu kegiatan yang terkena dampak efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025, dimana dampaknya adalah tidak adanya anggaran untuk pembiayaan petubel baru di tahun 2025, sehingga Pusat Pendidikan KP tidak bisa mencapai target tahunan pada 2025 sebanyak 190 orang. Sebagai tindak lanjut hal ini, Pusat Pendidikan KP akan mengajukan revisi Perjanjian Kinerja dan penyesuaian target pada IK ini.

Indikator Kinerja Utama 19

Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian rekomendasi izin belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian rekomendasi izin belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebanyak 82 orang. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, rekomendasi penetapan izin belajar yang sudah diberikan sebanyak 80 orang.

Indikator Kinerja Utama 20

Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)

Salah satu dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pegawai Tugas Belajar adalah pemberian rekomendasi oleh Kepala BPPSDM KP. IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi tugas belajar bagi Aparatur KKP yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tugas belajar merupakan upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal jenjang S2 dan S3.

Periode pengukuran adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 85 orang. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah penerbitan rekomendasi tugas belajar luar negeri sebanyak 2 orang dan penerbitan rekomendasi perpanjangan tugas belajar luar negeri sebanyak 1 orang dan penerbitan rekomendasi perpanjangan tugas belajar dalam negeri sebanyak 31 orang.

IKU ini menjadi salah satu IKU yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025, dimana dampaknya adalah tidak adanya tubel dibiayai tahun 2025, sehingga Pusat Pendidikan KP juga tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tugas belajar dalam negeri. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, Pusat Pendidikan KP akan mengajukan revisi Perjanjian Kinerja dan akan melakukan penyesuaian target pada IKU ini.

Sasaran Kegiatan 7

Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 21

Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)

Dalam rangka melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan KP mengusulkan 4 unit kerja pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu (1) Politeknik KP Sorong; (2) Politeknik KP Kupang, (3) Politeknik KP Bone; dan (4) Politeknik KP Dumai. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Sampai dengan Triwulan III 2025, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pendampingan penilaian Satuan Pendidikan KP yang diusulkan WBK oleh Inspektorat Jenderal, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.177/ITJ.3/HP.660/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Kupang dengan nilai 16,74 dan belum memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00;
2. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.169/ITJ.3/HP.660/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Dumai dengan nilai 86,99 dan telah memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00;
3. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.232/ITJ.3/HP.660/IV/2025 tanggal 23 April 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Bone dengan nilai 54,10 dan belum memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00;
4. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.224/ITJ.3/HP.640/IV/2025 tanggal 21 April 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Sorong dengan nilai 48,49 dan belum memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00

Surat dinas ini merupakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dipenuhi kekurangan dokumen sebagaimana rekomendasi di dalam surat tersebut

Indikator Kinerja 22

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

IK ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi). Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III Tahun 2025)

Tabel 3.7 Capaian IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan III				2025					Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 - 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
92,64	100	100	100	85	85	80,77	95,02	-19,23	87	92,84

Per Triwulan III Tahun 2025, dari target IK sebesar 85%, berdasarkan Nota Dinas dari Kepala BPPSDM KP No 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 80,77%, dengan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 85%, dan persentase capaian adalah 95,02%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024, maka terjadi penurunan capaian sebesar 19,23% Jika dibandingkan dengan target Rencana Kegiatan 2025 – 2029 sebesar 87%, maka persentase capaian sebesar 92,84%.

Penyebab tidak tercapainya target IK ini adalah, dari 26 rekomendasi temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan KP, baru 21 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, dan masih ada 5 rekomendasi yang masih dalam proses, antara lain :

Tabel 3.8 Rekomendasi temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	Dokumen TL	Status/Catatan
1	Kepala BPPSDMKP agar mengintruksikan secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan KP untuk Mengusulkan Keputusan Kepala BPPSDMKP tentang dokumen penetapan	Surat Kepala BPPSDM No.B.1338/BPPSDM/HP.550/VI /2025 tanggal 17 Juni 2025	Proses; <i>kurang dokumen:</i> belum terdapat usulan Keputusan Kepala BPPSDMKP tentang dokumen penetapan jumlah, jenis, dan

No	Rekomendasi	Dokumen TL	Status/Catatan
	jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pendidikan tinggi lingkup KKP berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran.		spesifikasi sarana pendidikan tinggi lingkup KKP berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran.
2	Kepala BPPSDMKP agar mengintruksikan secara tertulis Kepala Pusat Pendidikan KP agar Berkoordinasi dengan Kepala Biro SDMAO untuk merevisi SK Rencana Kebutuhan Tahun 2024	1) Surat Kepala BPPSDM No.B.1342/BPPSDM/HP.550/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 2) Nodin Kapusdik no.564/BPPSDM.3/KP.530/VI/2025 tgl 10 Juni 2025 3) Nota Dinas Kepala Biro SDMAO No.1152/SJ.3/KP.530/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Peninjauan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Itjen Terkait Keputusan Menteri KP Nomor 96 dan 97 Tahun 2024 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Tahun 2024 dan Usulan Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Tahun 2025	Proses dok 1-3 Ok <i>kurang dokumen</i> Belum terdapat revisi SK Rencana Kebutuhan Tahun 2024
3	Kepala BPPSDMKP agar mengintruksikan secara tertulis Kepala Pusat Pendidikan KP agar Berkoordinasi dengan Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP untuk Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada peserta tugas belajar yang belum dan tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	1) Surat Kepala BPPSDM No.B.1342/BPPSDM/HP.550/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 2) ND Kapusdik No.539/BPPSDM.3/KP.530/V/2025 tanggal 28 Mei 2025	Proses <i>kurang dokumen:</i> Belum Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada peserta tugas belajar yang belum dan tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
4	Kepala BPPSDMKP agar menginstruksikan secara tertulis Kepala Pusat Pendidikan KP untuk memerintahkan kepada Ketua Tim Kerja DUDI, Serapan Lulusan dan Kerja Sama untuk Berkoordinasi secara tertulis dengan bagian Kerja Sama Sekretariat	1) Surat Kepala BPPSDM No.B.1343/BPPSDM/HP.550/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 2) Memo Kapusdik kepada Kepala BPPSDMKP perihal Masukan draft revisi SOP penyusunan naskah kerjasama	Proses <i>kurang dokumen</i> Belum terdapat balasan dari bagian Kerja Sama Sekretariat BPPSDM terkait koordinasi tertulis

No	Rekomendasi	Dokumen TL	Status/Catatan
	BPPSDMKP untuk melakukan revisi SOP Penyusunan Naskah Kerja Sama Tahun 2025		
5	Kepala BPPSDMKP agar menginstruksikan secara tertulis Kepala Pusat Pendidikan KP untuk memerintahkan kepada Ketua Tim Kerja DUDI, Serapan Lulusan dan Kerja Sama untuk Melakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama untuk menilai efektivitas kerja sama dan memberikan rekomendasi perbaikan pada Tahun 2025	Surat Kepala BPPSDM No.B.1343/BPPSDM/HP.550/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025	Proses <i>kurang dokumen</i> belum Melakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama untuk menilai efektivitas kerja sama dan memberikan rekomendasi perbaikan pada Tahun 2025

sumber : Inspektorat Jenderal, KKP

Tindak lanjut agar IK ini tercapai targetnya pada triwulan IV Tahun 2025 adalah Pusat Pendidikan KP berkomunikasi intens dengan Tim Auditor Itjen dalam pemenuhan bukti dukung tindak lanjut rekomendasi pengawasan Pusat Pendidikan KP

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.9. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	85%	80,77%	95,02%
2	Pusat Pelatihan KP	85%	100%	117,65%
3	Pusat Penyuluhan KP	85%	100%	117,65%

sumber : Nota Dinas Kepala BPPSDM KP No. 953/BPPSDM/HP.510/X/2025

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah mencapai target dengan persentase capaian Pusat Pendidikan KP adalah 95,02%, Pusat Pelatihan KP adalah 117,65%, dan Pusat Penyuluhan KP sendiri sebesar 117,65%,

Indikator Kinerja 23

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas

Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, BPPSDM KP selaku pembina dari Pusat/Balai lingkup BPPSDM KP akan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Pusat Pendidikan KP.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target nilai sebesar 82. Sampai dengan Triwulan III 2025, sudah dilakukan kegiatan Penilaian Mandiri SAKIP pada level 2 dan level 3 lingkup BPPSDM KP, dimana untuk penilaian level 2 dilakukan pada tanggal 6 – 8 Mei 2025 di Ruang Rapat BBRSEKP, Gedung II, Ancol. Sementara kegiatan Penilaian Mandiri SAKIP pada level 3 unit kerja Pendidikan KP dilaksanakan pada 19 – 22 Mei 2025 di Politeknik AUP. Hasil penilaian tersebut sudah dituangkan melalui Surat Sekretaris BPPSDM KP No.B.4485/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, dengan nilai Pusat Pendidikan KP adalah 82,75.

Indikator Kinerja 24

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Pusat Pendidikan KP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan

disiplin. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi: (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%).

Periode pengukuran IK ini adalah semesteran, dimana Triwulan III tidak ditetapkan target. Sampai dengan triwulan III, nilai IP ASN Pusat Pendidikan KP yang dilansir dari laman ropeg.kkp.go.id sebesar 75,88.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IK ini adalah pegawai Pusat Pendidikan KP mengikuti peningkatan kompetensi melalui webinar/workshop/pelatihan untuk mendapatkan sertifikat dan mengunggahnya ke dalam aplikasi BKN untuk meningkatkan nilai kompetensi.

Indikator Kinerja 25

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 3.10 Capaian IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan III				2025					Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 - 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
-	-	-	-	80	80	100,00	120,00	-	80	120,00

Per Triwulan III Tahun 2025, dari target IK sebesar 80%, berdasarkan Nota Dinas Plh. Sekretaris BPPSDM KP No NOMOR 3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 100%, dengan persentase capaian adalah 120,00%. Ketercapaian IK ini tidak lepas dari kedisiplinan pengelola satker dan operator SIRUP dalam melakukan pembaruan data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala. IK ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IK ini baru ada pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 80%, maka persentase capaian mencapai 120,00%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 80%, maka persentase capaian adalah 120,00%

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.11. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	80	100	120,00
2	Pusat Pelatihan KP	80	100	120,00
3	Pusat Penyuluhan KP	80	100	120,00
4	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP	80	100	120,00

sumber : Nota Dinas Plh. Sekretaris BPPSDM KP No NOMOR 3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah melampaui target dengan persentase capaian seluruh Pusat adalah 120,00%.

Indikator Kinerja 26

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN perlu ditatausahakan sesuai dengan tata kelola yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Membedah permasalahan yang jamak ditemui dalam pengelolaan BMN bila ditelusuri lebih jauh pintu masuknya bisa dengan melihat penatausahaannya di satker, yaitu proses pembukuan/pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan. Kesalahan dalam penatausahaan BMN dapat dihindari apabila terbentuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target adalah 80% Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah pendataan BMN di Pusat Pendidikan KP secara berkala.

Indikator Kinerja 27

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2023, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target 1 Inovasi, dan diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo. Politeknik KP Sidoarjo mengajukan inovasi berupa *Online Single Submission* Politeknik KP Sidoarjo (ONE SEA) yaitu layanan secara online berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan layanan pendidikan dalam satu sistem aplikasi yang *real time, accessible dan responsive*. ONE SEA melayani publik dalam satu pintu dan telah dijalankan melalui Android Playstore: Politeknik KP Sidoarjo dan web : <http://oss.poltekkpsidoarjo.ac.id/>.

Indikator Kinerja 28

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

IK Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, *screenshot* aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IK lain.

Periode pengukuran IK ini adalah triwulanan, dengan target pada Triwulan III adalah 66%, dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 1057/BPPSDM.3/RC.610/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025, capaiannya adalah 66%, atau persentase capaian 100%.

Tabel 3.12 Capaian IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

Sasaran Kegiatan 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)										
Realisasi Triwulan III				2025					Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 – 2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2025
-	100	-	100	100	66	66	100,00	-34	100	66

Dari tabel di atas, Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024 sebesar 100%, maka terjadi penurunan capaian sebanyak 34%. Hal ini disebabkan perbedaan penetapan target antara tahun 2024 dan tahun 2025, dimana pada tahun 2025, penetapan target dibuat bertahap, sehingga capaian akhir adalah 100%, namun pada tahun 2024, penetapan target dari triwulan I sampai dengan IV dibuat sama yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100%, maka persentase capaian sudah mencapai 66%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 100%, maka persentase capaian adalah 66%. IK ini dimulai di tahun 2022, dengan capaian sebesar 100%, kemudian di tahun 2023 tidak ada IK ini. Dan IK ini kembali ada di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%

Tabel berikut menggambarkan target dan capaian dokumen pada IK ini :

Tabel 3.13 Target dan Capaian Dokumen pada IK : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

No	Target Dokumen Tahunan	Target Dokumen Triwulan III	Capaian Dokumen Triwulan III
Target Tahunan : 100% / 36 dokumen		Target : 44% / 24 dokumen	Capaian : 44% / 24 dokumen
1	Laporan Kepegawaian Triwulanan	Laporan Kepegawaian Triwulan I - III	Laporan Kepegawaian Triwulan I - III
2	Laporan Presensi Pegawai Triwulanan	Laporan Presensi Pegawai Triwulan I - III	Laporan Presensi Pegawai Triwulan I - III
3	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulanan	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulan I - III	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulan I - III
4	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulanan	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulan I - III	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulan I - III
5	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulanan	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulan I - III	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulan I - III
6	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulanan	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulan I - III	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulan I - III
7	Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan Keuangan Triwulan I - III	Laporan Keuangan Triwulan I - III
8	Laporan SPIP Triwulanan	Laporan SPIP Triwulan I - III	Laporan SPIP Triwulan I - III
9	Laporan PIPK		
10	Laporan Tahunan Pusat Pendidikan KP		
11	Laporan Tahunan Layanan Umum dan Perkantoran		
12	Refleksi 2025 dan Outlook 2026		

Penyebab tercapainya IK ini adalah komitmen dari Timja terkait untuk penyelesaian dan pengumpulan data dukung yang menjadi target Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis pada Triwulan ini.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini kegiatan Humas dan Publikasi Sosial Media, kegiatan pengendalian intern Pusat Pendidikan KP melalui SPIP, dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Pusat Pendidikan KP selama Triwulan III 2025

C. Akuntabilitas Keuangan

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Pusat Pendidikan KP melakukan upaya pembenahan Pendidikan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi melalui pembentukan *Ocean Institute of Indonesia* (OII), dengan

mengintegrasikan seluruh satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan menjadi satuan pendidikan KP unggulan nasional dan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut maka melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-15/M/S/HK.05.2/07/2025 hal Konfirmasi atas Program Pembangunan Modelling 100 Kampung Nelayan Merah Putih serta Modernisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Bapak Presiden memberikan arahan agar program pembangunan Modelling 100 Kampung Nelayan Merah Putih serta Modernisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan KP dapat segera direalisasikan dan diselesaikan pada tahun 2025.

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat permohonan anggaran yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Nomor B.678/MEN-KP/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 hal Permohonan Dukungan Anggaran untuk Revitalisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh BPPSDM dengan mengusulkan revisi optimalisasi anggaran untuk Modernisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan KP sebagaimana surat Nomor: B.1914/BPPSDM/RC.420/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 hal Usulan Revisi Anggaran BPPSDM Tahun 2025 dan pada tanggal 1 September 2025 terbit Persetujuan anggaran Modernisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan KP berdasarkan DIPA Revisi ke-6 tanggal 1 September 2025 dengan bertambahnya RO baru pada Pusat Pendidikan KP yaitu RO RAA dan RBJ dengan total pagu sebesar Rp.217.180.104.000 dalam rangka modernisasi satuan pendidikan KP, sehingga total pagu pada Pusat Pendidikan KP adalah Rp.234.513.676.000, dan total pagu bidang pendidikan KP sebesar Rp. 587.426.295.000. Namun, hal ini belum tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja, sehingga pengukuran kinerja Triwulan III masih berdasarkan PK Pusat Pendidikan KP per Juni 2025.

Dengan pagu anggaran Pusat Pendidikan KP tahun 2025 sebesar Rp.234.513.676.000, dengan penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp.14.946.465.360, atau sebesar 6,37%.

Tabel 3.14 Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Keuangan	%
1	BELANJA BARANG	29.304.222.000	8.559.794.466	29,21%	20.744.427.534	70,79%
	a. Barang Operasional	1.045.960.000	831.790.219	79,52%	214.169.781	20,48%
	c. Barang Non Operasional	28.258.262.000	7.728.004.247	27,35%	20.530.257.753	72,65%
2	BELANJA PEGAWAI	8.346.395.000	6.386.670.894	76,52%	1.959.724.106	23,48%
3	BELANJA MODAL	196.863.059.000	-	0,00%	196.863.059.000	100,00%
	JUMLAH	234.513.676.000	14.946.465.360	6,37%	219.567.210.640	93,63%

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP, dimana kinerja Pusat Pendidikan KP merupakan gabungan dari kinerja seluruh satuan pendidikan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pendidikan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per Sasaran Kegiatan bidang pendidikan KP berdasarkan PK

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 30 September 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	87.363.334.000	53.191.372.508	60,89%
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	442.710.000	113.014.030	25,53%
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.199.208.000	767.940.405	64,04%
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	244.397.914.000	3.070.074.306	1,26%
5	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih	7.322.517.000	7.169.403.347	97,91%
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	246.700.612.000	181.011.499.038	73,37%
TOTAL		587.426.295.000	245.323.303.634	41,76%

Secara umum kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Pusat Pendidikan KP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Sampai dengan Triwulan III, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga belum dapat dihitung efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya di Pusat Pendidikan KP.

BAB IV

- ▶ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**
- ▶ **Permasalahan dan Rekomendasi**

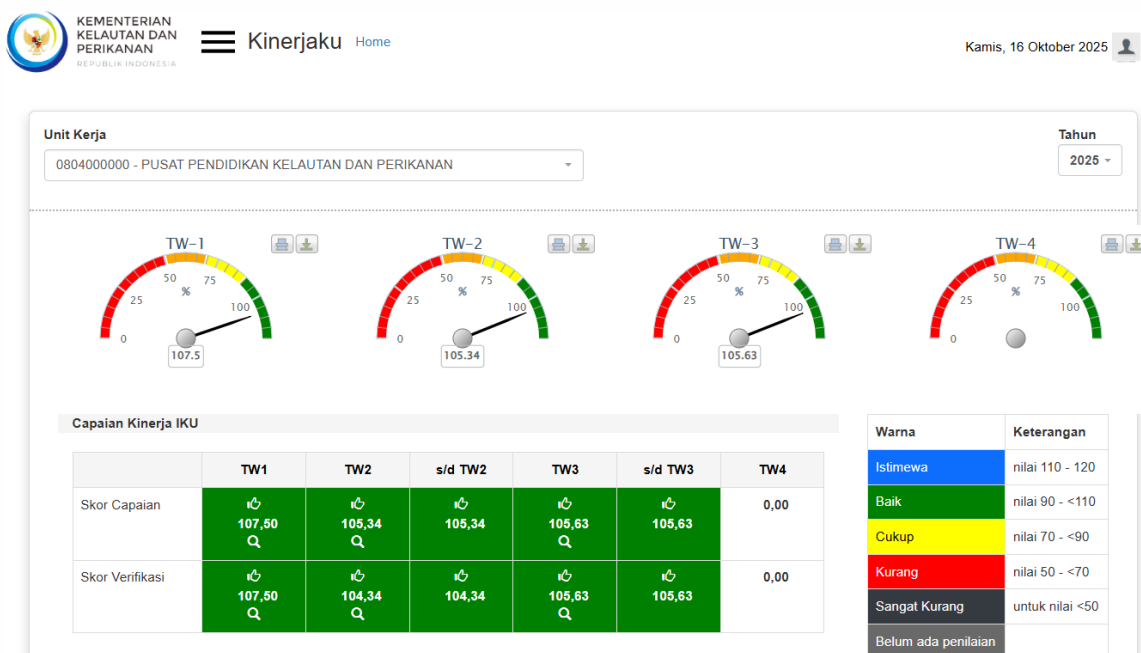
BAB IV

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Indikator Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja **Pusdik KP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105.63%**

Gambar 4.1. Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan III Tahun 2025 pada tampilan web :



sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target Triwulan III adalah 85%, dan capaian sebesar 80,77%, dengan persentase capaian adalah 95,02%;

2. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 80%, target Triwulan III adalah 80%, dan capaian sebesar 80%, dengan persentase capaian adalah 120,00%;
3. IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 100%, target Triwulan III adalah 66%, dan capaian sebesar 66%, dengan persentase capaian adalah 100,00%.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada Triwulan III cukup baik, dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,63. Namun, ada satu IKU yang tidak mencapai target, yaitu IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target Triwulan III adalah 85%, dan capaian sebesar 80,77%, dengan persentase capaian adalah 95,02%. Untuk mengantisipasi ketidaktercapaian IK ini pada triwulan berikutnya, Pusat Pendidikan KP akan berkomunikasi rutin dengan Tim Auditor Itjen dalam pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan.



LAMPIRAN

Link Bukti Dukung :

https://portal-repo.kkp.go.id/s/Kinerja_Pusdik_TWIII_2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Alan Frendy Koropitan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	2.134
		2 Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	7.615
		4 Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	17,48
		5 Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	32
		6 Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	70
		7 Persentase lulusan satuan pendidikan yang besertifikasi kompetensi (%)	100
		8 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100
		9 Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	80
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	10 Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	51
		11 Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	14
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	12 Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	500
		13 Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	6
		14 Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	16
		15 Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	16

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
4	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	5
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	3
5	Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	85
6	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	4
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	1
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	275.156.110.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000
Total Anggaran Pendidikan KP Tahun 2025		472.453.755.000

Jakarta, 26 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alan Frendy Koropitan**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan


Alan Frendy Koropitan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	2.134
		2 Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	7.615
		4 Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	17,48
		5 Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	32
		6 Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	70
		7 Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		8 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100
		9 Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	80
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	10 Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	51
		11 Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	14
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	12 Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	500
		13 Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	6
		14 Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	16
		15 Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	16

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
4	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	5
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	3
5	Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	85
6	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	4
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	1
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	275.156.110.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000
Total Anggaran Pendidikan KP Tahun 2025		472.453.755.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Alan Frendy Koropitan